



Analisis Konsep Dan Teori Penerapan Good Corporate Governance Pada CV. Petra Kausa Medan

M. Iqbal, MA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Maya Oktavia Dalimunthe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rika Umbaiyani Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tira Syahira

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Williem Iskandar Ps. V Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: muhammadiqbaldoehy@gmail.com

Abstrak. *The continuously developing business world requires industry players to design and implement new corporate governance structures, namely superior corporate governance. This research is only qualitative research that uses observation and interview procedures as data collection methods. The aim goal this study is to determine how the concepts and theories of sound business principles are applied to CV. Petra Kausa Medan. Research findings show that businesses adhere to the concept of transparency by providing information to internal and external stakeholders. Delivery of company policies is followed both in writing and verbally. When it comes to accountability, businesses have established goals, performance metrics, and internal control systems. Regarding the principle of accountability, corporations have complied with regulatory standards and implemented corporate social responsibility by not damaging the environment. This business operates based on the principle of independence, free from interference from outside parties. To be fair, all departments in the organization are treated equally.*

Keywords: *Good Corporate Governance; Concept; Theory*

Abstrak. *Dunia bisnis yang terus berkembang menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam sektor ini untuk menciptakan dan menerapkan kerangka tata kelola perusahaan yang baru, yaitu tata kelola perusahaan yang lebih baik. Penelitian ini hanya mengumpulkan data secara kualitatif melalui penggunaan teknik wawancara dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana CV. Petra Kausa Medan menerapkan ide dan teori tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menjunjung tinggi gagasan transparansi dengan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kebijakan perusahaan pengiriman dipatuhi dengan sangat ketat tertulis maupun lisan. Dalam hal akuntabilitas, bisnis telah menetapkan tujuan, metrik kinerja, dan sistem pengendalian internal. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, korporasi telah mematuhi standar peraturan dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tidak merusak lingkungan. Bisnis ini beroperasi berdasarkan prinsip independensi, bebas dari campur tangan pihak luar. Agar adil, semua departemen dalam organisasi diperlakukan sama.*

Kata Kunci: *Good Corporate Governance; Konsep; Teori*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, persaingan antar pelaku usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Perusahaan kini harus menghadapi tingkat persaingan yang lebih rumit dan ketat serta faktor eksternal yang berubah secara tidak terduga, termasuk iklim politik dan ekonomi negara, gerakan saingannya, preferensi pemasok dan pelanggan, serta peraturan pemerintah. Saat berhadapan dengan persaingan komersial dunia usaha harus menerapkan praktik bisnis yang sehat (GCG) secara efektif.

Salah satu landasan perkembangan perusahaan adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian jangka panjang, GCG mendorong berkembangnya iklim usaha yang kondusif dan produktif serta persaingan yang sehat (KNKG, 2016). Lima (lima) prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik diikuti di Indonesia. kadang-kadang disebut sebagai Tarif (Dairi, 2016). Komponen pertama adalah keterbukaan, yaitu transparansi dalam segala hal, termasuk proses pengambilan keputusan dan penyediaan informasi yang akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan.

Ketiga, tanggung jawab adalah kepatuhan organisasi terhadap undang-undang yang relevan, seperti undang-undang yang berkaitan dengan pajak atau menjunjung praktik bisnis yang sesuai, dan lain-lain. Kedua, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan struktur untuk menjalankan bisnis dengan baik. Berikutnya adalah independensi, atau kemampuan bisnis dalam mengelola dirinya secara profesional dan tanpa campur tangan pihak luar. Pada akhirnya, memperlakukan berbagai kepentingan dalam organisasi secara adil merupakan kekuatan yang memotivasi.

Tata kelola perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dunia usaha yang mampu menjunjung keseimbangan antara beragam kepentingan, sehingga memungkinkan mereka untuk membantu dunia usaha. Pesta di luar individu dengan keahlian yang lebih sedikit juga dapat menentukan kualitas suatu perusahaan dengan memeriksa peringkat CGPI IICG. Skor tata kelola perusahaan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan organisasi dalam hal transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, dan independensi, dan sebaliknya. (Solikha & Wahyudin, 2017).

Salah satu perusahaan di wilayah Medan yang bergerak di bidang pembelian produk dan jasa adalah CV Petra Kausa. Pengadaan sebagaimana diketahui merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan sumber daya (barang dan jasa) untuk suatu proyek tertentu. Banyak entitas, termasuk entitas publik dan komersial, telah berpartisipasi dalam pengadaan produk dan layanan, yang terkadang disebut sebagai lelang. CV Petra berkomitmen untuk bertahan dan mengembangkan perusahaannya. Saat ini, tata kelola perusahaan yang unggul harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut agar dapat maju.

Dengan meningkatnya daya saing perusahaan, pengelolaan informasi di sekolah dipengaruhi oleh penggunaan teknologi komputerisasi dan digitalisasi di lingkungan pendidikan saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi memainkan peran penting dalam penyediaan layanan informasi bagi berbagai organisasi dan masyarakat.

Interaksi antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan, dan pemegang saham disebut sebagai good corporate governance (GCG) dalam industri perbankan (Sugiarto, 2006). Menurut Rusdiyanto (2019), tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah struktur, protokol, dan proses yang ditujukan untuk penyelenggaraan bisnis berdasarkan prinsip akuntabilitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai organisasi.

Sebuah sistem yang disebut tata kelola perusahaan digunakan untuk memandu dan mengelola upaya komersial perusahaan. Peraturan yang mengatur penugasan tugas dan kewajiban kepada peserta, atau “pemain kunci”, yang memiliki kepentingan berbeda-beda dalam bisnis juga termasuk dalam definisi tata kelola perusahaan. Dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam pengarahan dan pengendalian perusahaan (Masyhud, 2006).

Menurut definisi yang diberikan di atas, tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem yang mengacu pada prosedur dan struktur yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk

memimpin dan mengatur bisnis guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, mewujudkan nilai saham, dan menghindari kesalahan manajemen atau penipuan. dapat merugikan pemangku kepentingan pada umumnya dan pemegang saham pada khususnya.

Tingkat sejauh mana direksi senantiasa memasukkan prinsip-prinsip GCG transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan ke dalam keputusannya akan menentukan sejauh mana penerapannya. Dua prasyarat yang diperlukan untuk manajemen risiko: independensi dan kompetensi dewan direksi.

Untuk melindungi pemegang saham minoritas dari kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak internal, maka korporasi harus tetap menjaga rasa keadilan terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk direksi. Hal ini menuntut independensi dewan. Selain itu, independensi akan mendorong transparansi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami fenomena-fenomena yang ditemui subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui penggunaan deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks. yang sangat alami serta berbagai metode alami. Penelitian lapangan, di sisi lain, melibatkan peneliti yang terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data tentang suatu fenomena "in situ", atau yang terjadi di habitat aslinya. Peneliti lapangan biasanya membuat banyak catatan di lapangan, yang kemudian diberi kode dan dilakukan berbagai analisis. Untuk memberikan alur kerja yang sesuai sehingga peneliti yang melakukan penelitian ini dapat dijadikan acuan, maka teknik penelitian ini dilakukan secara kualitatif. untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan dan bahwa tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai secara efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Data dan Analisis

Komponen penelitian yang menyajikan data sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang bersangkutan disebut dengan penyajian data. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini guna menunjangnya. Data hasil penelitian yang berkaitan dengan titik fokus permasalahan akan disajikan secara berurutan.

a. Analisis Konsep Dan Teori Penerapan Good Corporate Governance Pada CV. Petra Kausa Medan

Penerapan Konsep atau Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Dunia Usaha: Agar penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat berhasil, diperlukan prinsip-prinsip panduan tertentu. Lima prinsip pedoman tata kelola perusahaan yang baik adalah akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan menurut KNKG (2016).

Berikut penjelasan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan. Komunikasi terbuka tentang informasi perusahaan diberikan kepada karyawan. Data yang ditawarkan mencakup rincian tujuan, hukum, visi, dan tujuan saat ini. Setiap informasi yang dikumpulkan akan diberikan langsung kepada karyawan terkait. Selain pengiriman langsung, bisnis juga memanfaatkan media,

termasuk email, WhatsApp, dan telepon, untuk memberikan informasi terbaru kepada stafnya. Informasi disebarluaskan melalui media apabila dan pada saat pihak-pihak yang terlibat tidak berada pada lokasi yang sama ketika menerima informasi tersebut.

Pengamatan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa bisnis tersebut menawarkan computer atau laptop dan konektivitas internet di selain itu, setiap karyawan memiliki telepon seluler. Informasi apa pun yang dikumpulkan yang tidak segera diberikan kepada pekerja. Informasi tertentu pada awalnya ditangani oleh komisaris atau pimpinan, dan kemudian informasi tersebut tersedia bagi staf setelah keputusan diambil. Selain keterbukaan informasi dalam suatu organisasi, juga terjadi keterbukaan informasi kepada pihak luar seperti masyarakat atau pelanggan. Saat ini, dunia usaha memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat umum, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya. Selain itu bisnis hanya menawarkan email kepada pihak luar yang ingin memperoleh informasi dan tidak memiliki website. Coba telpon. Korporasi menjelaskan kepada pelanggan tujuan dan proses yang terlibat dalam perolehan barang dan jasa. Apapun yang diputuskan untuk setiap kebijakan perusahaan akan dikomunikasikan baik secara lisan maupun tertulis. Setiap kebijakan yang dikeluarkan menjalani penilaian setidaknya setiap tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan para pekerja untuk mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi, dan kemudian mengadakan pertemuan untuk menentukan apakah kebijakan yang ada saat ini harus diikuti atau apakah kebijakan tersebut perlu diubah. Struktur organisasi dan rincian tugas korporasi terdiri dari sistem pengendalian internalnya. Untuk memastikan, dengan cara yang jelas dan konsisten dengan nilai-nilai dan strategi perusahaan, kewajiban dan tanggung jawab khusus seluruh organ dan personel perusahaan.

Ada deskripsi pekerjaan di perusahaan. Menyadari bahwa struktur organisasi dan setiap pekerja mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Bisnis melakukan wawancara sebagai bagian dari proses perekrutannya. Perusahaan kini mempekerjakan orang secara eksklusif melalui koneksi; mereka tidak menggunakan internet, iklan, atau media lainnya. Selain mengevaluasi kinerja, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, organisasi mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang dicapai.

Selain tujuan, perusahaan meninjau laporan dan penilaian manajemen. Apabila pekerja yang bersangkutan tidak masuk kerja sekurang-kurangnya dua hari berturut-turut, maka pemberi kerja tidak akan melaksanakan sanksi tersebut. Apabila pegawai yang bersangkutan melanggar kebijakan, maka akan mendapat surat peringatan sebanyak tiga kali hingga dipecat. PHK pada Perusahaan pekerja juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, bukan berdasarkan PHK sepihak seperti yang dilakukan dalam hal pekerja melakukan penipuan; namun, hingga saat ini, organisasi tersebut belum mengalami situasi seperti yang dijelaskan di atas. Organisasi ini ingin berekspansi ke pasar baru dan menawar kontrak yang lebih banyak dan lebih besar. Perusahaan tersebut baru saja menyelesaikan surat-surat yang diperlukan agar memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran proyek, dan belum ada rencana pelaksanaan yang pasti.

Dunia usaha tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkaitan dengan lingkungan karena mereka bukan merupakan perusahaan produksi tunggal, melainkan sebuah perusahaan yang membeli produk dan jasa, belum memiliki satu sumber pendapatan yang signifikan, dan tidak memproduksi. limbah apa pun yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Hal ini terlihat jelas di tempat kerja yang tidak terdapat limbah produksi. Sementara itu, di dunia bisnis, mengingat kekhawatiran kontemporer mengenai go green.

Fakta bahwa tempat kerja masih kekurangan penghijauan merupakan topik yang banyak didiskusikan. Saat ini, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Menurut temuan para peneliti, perusahaan tidak membuat keributan dan menjaga tempat kerja tetap rapi. Masyarakat sekitar mungkin akan terganggu dengan operasional bisnis yang hanya masuk pada pukul 17.00 WIB pada hari Senin sampai Jumat agar tidak mengganggu waktu senggang masyarakat. Hingga saat ini, perusahaan tersebut belum melakukan kegiatan CSR yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pemberian hibah. Kepatuhan pembayaran pajak menjadi pertimbangan ketika mengevaluasi kesesuaian dengan persyaratan pemerintah. Dengan membayar pajak kepada Negara, maka korporasi telah memenuhi kewajibannya terhadap Negara. Selain itu, organisasi membayar karyawan sesuai dengan peraturan upah minimum federal. Selain membayar gaji, bisnis ini tidak mempekerjakan siapa pun yang berusia kurang dari 17 tahun. Dalam hal hak konsumen, pihak bisnis tidak membatasi hak-hak seperti hak atas penggantian atau penggantian apabila barang tidak sesuai kesepakatan atau sebagaimana mestinya. Suatu korporasi harus melakukan pengelolaan secara mandiri atau mandiri agar setiap bidang usahanya terbebas dari dominasi yang saling eksklusif dan dari intervensi pihak luar (KNKG, 2016). Materinya berupa strategi menghindari konflik kepentingan, campur tangan pihak ketiga dalam pengambilan keputusan, kesenjangan kepentingan pemegang saham, kekuasaan pengambilan keputusan, dan akuntabilitas organ usaha. Untuk mencegah konflik kepentingan, perusahaan telah mengadopsi gagasan independensi. Bekerja sama adalah prioritas utama perusahaan di setiap departemen.

Kepentingan utama adalah kepentingan perusahaan. Selain itu, tidak ada departemen dalam perusahaan yang didirikan atas dasar hubungan pribadi atau profesional dengan pemilik atau kepentingan tertentu. Selain itu, bisnis telah menggunakan konsep independensi dengan menahan diri SOP tersebut menguraikan prosedur operasional standar bagi setiap pegawai, dengan demikian ada aturan yang harus dipatuhi saat bekerja, sehingga para pihak kurang mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan saat ini. Organisasi juga berhasil menerapkan apresiasi independensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini analog dengan kepemimpinan yang mendelegasikan wewenang berdasarkan wewenang individu. Selain itu, pelaku usaha tidak pernah mengalihkan pertanggungjawaban kepada pelaku usaha lain karena setiap tugas dan kedudukan dalam pelaku usaha telah dijelaskan.

Dalam setiap pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan saran dan menyuarakan pendapat mengenai kepentingan perusahaan. Misalnya, jika menyangkut peraturan perusahaan yang tidak sah, seperti mengatur waktu cuti karyawan, setiap karyawan bebas mengutarakan pendapatnya. Selain itu, karyawan menerima perlakuan yang sama tanpa memandang jenis kelamin atau afiliasi agama mereka. Meskipun mayoritas pekerja di organisasi ini adalah pekerja laki-laki, namun pekerja perempuan mempunyai hak yang sama dengan pekerja laki-laki, termasuk hak untuk mengambil cuti melahirkan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Hak yang sama tetap diberikan kepada pekerja laki-laki dan perempuan berupa gaji, tunjangan, dan THR yang ditentukan berdasarkan hari libur. Dari segi agama, sebagian besar perusahaan ini beragama Islam. Terbukti bahwa tidak ada variasi dalam perlakuan terhadap karyawan di organisasi.

Karyawan Muslim diperbolehkan melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat. Mengucapkan doa akan ada dua jam pada hari Jumat: satu jam untuk sholat dan satu jam untuk makan siang. Untuk prosedurnya organisasi mendasarkan lintasan karier karyawannya pada kinerja mereka.

Perusahaan memberikan sanksi. Korporasi memiliki sistem peringatan tiga huruf untuk hukuman. Pekerja yang melanggar aturan akan mendapat surat peringatan (SP) mulai dari SP1 hingga SP3. Jika ada pegawai yang mendapat SP melalui SP3, maka akan dipecat. Selain itu, menurut seorang sumber, pihak korporasi juga memberikan sanksi seperti mengharuskan Anda membayar Rp 50.000 setiap kali bolos kerja tanpa alasan yang sah.

KESIMPULAN

Dengan mengikuti gagasan keterbukaan, organisasi secara konsisten memberikan informasi yang transparan kepada karyawannya. Informasi yang dikirimkan ke pihak internal ditinjau secara transparan, tepat waktu, dan efektif. Bisnis telah memberikan akses informasi kepada pihak luar. Bagi perusahaan kebijakan diberikan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada dunia usaha.

Jelas bahwa bisnis mempunyai sistem pengendalian internal, yang mencakup informasi tentang peran dan tanggung jawab serta keberadaan struktur organisasi bisnis. Organisasi juga menggunakan wawancara untuk mengukur kinerja karyawan sehubungan dengan pencapaian tujuan dan untuk melihat laporan dan penilaian manajemen. Terlepas dari tantangan yang ada, tujuan jangka panjang perusahaan ini mencakup ekspansi ke pasar yang lebih besar dan berpartisipasi dalam penawaran proyek-proyek besar. Strategi saat ini sedang dikembangkan. Bisnis ini telah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan mematuhi undang-undang pemerintah dan menghindari kerusakan lingkungan, sambil menerapkan konsep tanggap. Korporasi telah terlibat dalam CSR meskipun ada sejumlah masalah yang luput dari perhatian, termasuk: Tidak ada tindakan finansial atau bantuan masyarakat lainnya yang dilakukan. Sementara itu, sesuai dengan aturan resmi, perusahaan telah bekerja sama dengan kebijakan perusahaan, membayar gaji sesuai dengan undang-undang upah minimum, menghindari mempekerjakan anak di bawah umur, dan memenuhi kewajibannya kepada Negara dengan menyetor pajak.

Penerapan konsep independensi yang menyatakan bahwa setiap karyawan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya secara sah dan sah serta hanya keinginan untuk kemajuan perusahaan sebagai prioritas utama. Dunia usaha telah berupaya menerapkan konsep keadilan. Terkait hak dan tanggung jawab setiap pekerja, korporasi tidak membedakan pekerjaannya. Hal ini terlihat dari setiap pegawai yang mendapat gaji berdasarkan kinerja dan jabatannya, serta mendapat penalti. Sementara itu, pelanggan dapat mengembalikan barang ke perusahaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan mengenai pengembalian barang dagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, Mas Achmad. (2016). *Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Efendi, M. (2016). *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

*JUDUL ARTIKEL SPESIFIK, EFEKTIF, JELAS DAN TIDAK LEBIH DARI 15 KATA. HINDARI
PENCANTUMAN LOKASI PENELITIAN, NAMA PERATURAN, DAN SINGKATAN.*

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum GCG Indonesia, Jakarta.

Shinta Wahyu Hati, Awik Arumrasmy (2017). Prosiding dari Seminar Nasional Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan di Universitas Lampung. Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai Di Politeknik Negeri Batam. Hal 56-76

Wahyudin, Agus & Solikhah, Badingatus. (2017). Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society Vol. 17 pp.250- 265